

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	14
2.1. Kedudukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Aparatur Sipil Negara	14
2.2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.....	19

2.3. Konsep Wewenang.....	23
2.4. Penyalahgunaan Wewenang oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Terkait Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan	25
BAB III PEMBERATAN SANKSI PIDANA BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ...	
3.1 Konsep Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	30
3.1.1 Klasifikasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	41
3.2 Sanksi Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika.....	46
3.2.1. Penjatuhan Sanksi Administratif	47
3.2.2. Sanksi Pidana	49
3.3 Penerapan Pemberatan Pidana Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika	53
3.3.1 Anotasi Putusan Nomor 784 / Pid.Sus / 2019 / PN Dps	54
3.3.2 Analisa Putusan.....	63
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	xv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.